

**PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI OLEH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA  
BUKITTINGGI TERHADAP PT. INANTA BHAKTI UTAMA DALAM  
PROYEK DRAINASE**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Hukum**

**Oleh:**

**RADELLA ELFANI**

**NIM. 2120113033**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.Hum**
- 2. Dr. Yufasni, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI OLEH DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI  
TERHADAP PT. INANTA BHAKTI UTAMA  
DALAM PROYEK DRAINASE**

**(Radella Elfani, 2120113033, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Andalas, 153 Halaman, 2023)**

**ABSTRAK**

Dewasa ini pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi tidak selalu berjalan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditentukan. Baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal yang datang dari kedua belah pihak. Seperti peristiwa yang terjadi pada pekerjaan Peningkatan Saluran Drainase Primer Rumah Potong hingga SMPN 1 Kota Bukittinggi, dimana pada akhir tahun 2021 terjadi pemutusan kontrak jasa konstruksi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama. Rumusan penelitian pada tesis ini adalah :1.Bagaimanakah mekanisme pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari adanya pemutusan kontrak kerja konstruksi baik terhadap PT. Inanta Bhakti Utama maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi? 3.Bagaimanakah solusi dari perspektif teori keadilan dan kepastian hukum terhadap permasalahan pemutusan kontrak kerja konstruksi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan mengamati secara empiris permasalahan pemutusan kontrak tersebut, membandingkan hasil dari data yang didapatkan di lapangan dengan studi literatur dan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Sifat penelitian ini adalah kualitatif, dengan menganalisis secara kualitatif apa yang digambarkan dalam penelitian dengan menggunakan teori yang ada. pemutusan kontrak kerja konstruksi terhadap PT. Inanta Bhakti Utama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dilakukan karena PT. Inanta Bhakti Utama tidak memenuhi target rencana dalam uji coba Tahap I, Tahap II, dan Tahap III. Akibat hukumnya adalah PT. Inanta Bhakti Utama kehilangan hak-hak sebagai penyedia jasa konstruksi dan menghadapi sanksi daftar hitam. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, solusi yang dianjurkan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai konsep keadilan dan kesetaraan dalam kontrak kerja konstruksi serta menciptakan regulasi yang jelas dan transparan. Selain itu, kepastian hukum juga penting dalam perjanjian untuk memberikan jaminan hak-hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum, dan proses pengadilan dapat membantu mencapai tujuan kepastian hukum dalam pemutusan kontrak.

**Kata Kunci:** *Pemutusan Kontrak, Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi*

**CONTRACT TERMINATION OF CONSTRUCTION SERVICES BY THE  
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING OF  
BUKITTINGGI CITY AGAINST PT. INANTA BHAKTI UTAMA IN DRAINAGE  
PROJECT**

*(Radella Elfani, 2120113033, Master of Law Program, Faculty of Law, Andalas  
University, 153 pages, 2023)*

**ABSTRACT**

Nowadays, the implementation of construction services is not always in line with the planned schedule and time, due to both internal and external factors from both parties involved. An example of such an incident occurred in the project of improving the Primary Drainage Channel from Rumah Potong to SMPN 1 in Kota Bukittinggi, where the construction contract was terminated by the Department of Public Works and Spatial Planning of Kota Bukittinggi against PT. Inanta Bhakti Utama at the end of 2021. The research objectives of this thesis are: 1. What is the mechanism of contract termination employed by the Department of Public Works and Spatial Planning of Kota Bukittinggi against PT. Inanta Bhakti Utama? 2. What are the legal consequences of the construction contract termination for both PT. Inanta Bhakti Utama and the Department of Public Works and Spatial Planning of Kota Bukittinggi? 3. What are the solutions from the perspective of justice theory and legal certainty in addressing the issues of construction contract termination against PT. Inanta Bhakti Utama by the Department of Public Works and Spatial Planning of Kota Bukittinggi? The research method used in this study is an empirical approach, observing the contract termination problem empirically, comparing the data obtained from the field with literature studies and normative legal provisions. The nature of this research is qualitative, analyzing qualitatively what is described in the study using existing theories. The construction contract termination against PT. Inanta Bhakti Utama by the Department of Public Works and Spatial Planning of Kota Bukittinggi was due to PT. Inanta Bhakti Utama's failure to meet the planned targets in Phase I, Phase II, and Phase III trials. The legal consequences include PT. Inanta Bhakti Utama losing its rights as a construction service provider and facing blacklisting sanctions. In addressing such issues, it is recommended to raise awareness and understanding of the concepts of justice and equality in construction contracts, as well as establishing clear and transparent regulations. Additionally, legal certainty is crucial in agreements to ensure that rights and obligations are protected by the law, and the judicial process can help achieve the goal of legal certainty in contract termination.

**Keywords:** *Contract Termination, Construction Services, Construction Service Providers*